

BAB IV

HAMBATAN-HAMBATAN ASEAN DALAM UPAYA MENANGANI

KARTEL NARKOBA DALAM ASPEK POLITIK

Perkembangan kartel narkoba di ASEAN telah menunjukkan taraf yang mengkhawatirkan hingga tahun 2014 masih menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan. Diantara penyebab dari persoalan ini adalah kurangnya sumber daya manusia dan peralatan untuk dapat mendeteksi ruang gerak dan operasional kartel tersebut akibat cakupan wilayah yang luas di negara-negara ASEAN. Akibatnya kartel narkoba dengan leluasa memasukan barang haram ke negara-negara ASEAN, khususnya yang memiliki luas wilayah yang besar, seperti halnya Indonesia, Filipina dan Thailand.

Hambatan selanjutnya bagi upaya pemberantasan kartel narkoba di negara-negara ASEAN adalah adanya benturan antara kepentingan nasional negara-negara ASEAN. Masing-masing negara Asia Tenggara ini ternyata memiliki prioritas agenda keamanan yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan sulitnya terbentuknya sikap kesepahaman, sehingga upaya dalam menangani kartel narkoba menjadi kurang dapat berjalan secara efektif. Inilah yang menjadi hambatan bagi ASEAN dalam menangani kartel narkoba dalam aspek politik.

Jika dikaitkan dengan teori efektifitas rezim maka upaya ASEAN dalam menangani kartel narkoba tidak lepas dari berbagai hambatan, sehingga organisasi ini

tidak sepenuhnya mampu dalam mempengaruhi negara-negara anggotanya. Faktor keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan menjadi bukti bahwa sejak didirikan pada tahun 187 hingga periode 2008-2014 ASEAN belum dapat membangun integrasi keamanan, misalnya memiliki otoritas, sumber daya manusia, perangkat hukum secara tunggal dan terintegrasi. Kemudian jika dilihat dari aspek politik lainnya, yaitu kedaulatan (*sovereignty*) maka negara-negara ASEAN masing-masing memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga persoalan kartel narkoba hanya menjadi prioritas beberapa negara saja, misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand dan beberapa negara lainnya, sedangkan bagi negara lain, diantaranya Laos, Myanmar, Brunei Darusallam dan negara lain memandang persoalan kartel narkoba bukan sebagai prioritas. Inilah yang menyebabkan sulitnya ASEAN dalam mempengaruhi negara-negara anggotanya untuk bekerja-sama dan bersikap pro-aktif dalam menangani kartel narkoba di wilayah Asia Tenggara. Gambaran tentang berbagai hambatan ASEAN dalam menangani kartel narkoba ini akan diuraikan pada bab IV sebagai berikut.

A. Benturan Rezim dalam Memberantas Perdagangan Narkotika di Negara-Negara ASEAN

Peredaran narkoba merupakan bagian dari bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga persoalan ini mampu menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menindaklanjuti persoalan ini melalui pembentukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada

tahun 1997. Ini menunjukkan bahwa persoalan narkoba selain menjadi persoalan keamanan internasional juga telah berkembang menjadi masalah yang berkaitan dengan *human security*.¹

Penanganan masalah kartel narkoba di wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar negaranya merupakan kelompok NIE's (*New Industrial Countries*) tidak lepas dari berbagai hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, baik baik sumber daya manusia ataupun peralatan yang memadai. Ini tidak semata-mata akibat berkaitan dengan sikap politik yang lemah, namun juga karena orientasi NIE's yang merupakan negara yang pada taraf membangun sehingga masalah keamanan hanya menjadi salah satu prioritas saja selain ekonomi, pembangunan fisik, sosial dan lain-lainnya.

Peredaran narkoba merupakan bagian dari bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga persoalan ini mampu menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menindaklanjuti persoalan ini melalui pembentukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 1997. Ini menunjukkan bahwa persoalan narkoba selain menjadi persoalan keamanan internasional juga telah berkembang menjadi masalah yang berkaitan dengan *human security*.²

Penanganan masalah kartel narkoba di wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar negaranya merupakan kelompok NIE's (*New Industrial Countries*) tidak lepas

¹ Reuel R. Hanks, *Global Security Watch in Asia*, Prager Publishing and ABC Clio, Denver Colorado, 2012, hal119.

² Reuel R. Hanks, *Global Security Watch in Asia*, Prager Publishing and ABC Clio, Denver Colorado, 2012, hal119.

dari berbagai hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, baik baik sumber daya manusia ataupun peralatan yang memadai. Ini tidak semata-mata akibat berkaitan dengan sikap politik yang lemah, namun juga karena orientasi NIE's yang merupakan negara yang pada taraf membangun sehingga masalah keamanan hanya menjadi salah satu prioritas saja selain ekonomi, pembangunan fisik, sosial dan lain-lainnya.

Munculnya hambatan ASEAN jika dikaitkan dengan teori efektifitas rezim berkaitan dengan *problem malignancy* adalah persoalan dalam aspek keamanan, dimana peredaran obat bius yang rapi, modus operandi yang berubah-ubah hingga hambatan teknis dan geografis menjadi sulitnya penanganan kartel narkoba di ASEAN. Kemudian terdapat juga hambatan dalam konteks politik yaitu berkaitan dengan kapabilitas ASEAN dalam mempengaruhi negara-negara anggotanya yang belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia dan adanya benturan kepentingan di antara negara-negara ASEAN sendiri, sehingga *level of collaborations* hingga hasil dari peran ASEAN dalam menangani kartel narkoba ini belum sepenuhnya berhasil.

Teori rezim di atas secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ASEAN merupakan organisasi menaungi negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi ini kemudian memiliki pengaruh yang kuat untuk dapat mempengaruhi negara-negara anggotanya sesuai dengan seting organisasi dan pembentukan organisasi, yaitu Deklarasi Bangkok tahun 1967. Kemudian di era globalisasi peran ASEAN semakin

kompleks ketika negara ini berupaya memperluas pengaruhnya, diantaranya kerjasama ASEAN+3 yang melibatkan Jepang, China dan Korea Selatan.

Perkembangan ASEAN pada periode 2008-2014 ternyata tidak cukup mampu dalam menangani berbagai persoalan yang sensitive atau persoalan baru, termasuk kejahatan luar biasa yang di dalamnya meliputi terorisme dan peredaran narkotika. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kavi Chingkitavom yang menyatakan bahwa :

“...masalah kejahatan luar biasa masih menjadi prioritas beberapa negara ASEAN, namun tidak semua ASEAN. Akibatnya tidak ada keseragaman ataupun peramaan sikap dan inisiatif bersama akan sulit dijalankan karena benturan kepentingan dengan masalah keamanan ataupun sosial lainnya dan untuk sementara kerjasama bilateral (G to G) dan format lainnya dapat menjadi solusi.”³

Jika dihubungkan dengan pendekatan teori efektifitas rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal maka resistensi negara-negara ASEAN ternyata tidak lepas dari adanya sikap primordialisme sekaligus benturan kepentingan nasional. Ini disebabkan level kolaborasi berkaitan dengan kapasitas ASEAN untuk mempengaruhi negara-negara anggotanya relatif lemah. Kapasitas ASEAN juga masih berada pada level kerjasama sosial, ekonomi dan budaya dan masih

³ Kavi Chingkitavom, “Going To ASEAN Community : Security Common Policy dis-Order”, *The Journal of Security and Public Policy*, Nanyang University, Singapore, 2014, hal.29-30.

menghindari non-coercion dan non-intervention. Inilah yang menyebabkan penanganan TOC belum dapat berjalan secara optimal.

B. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Peralatan (*Equipment*) Untuk Mendeteksi Jaringan Kartel Narkoba di Wilayah ASEAN

Peredaran narkoba merupakan bagian dari bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga persoalan ini mampu menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menindaklanjuti persoalan ini melalui pembentukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 1997. Ini menunjukkan bahwa persoalan narkoba selain menjadi persoalan keamanan internasional juga telah berkembang menjadi masalah yang berkaitan dengan *human security*.⁴

Penanganan masalah kartel narkoba di wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar negaranya merupakan kelompok NIE's (*New Industrial Countries*) tidak lepas dari berbagai hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia ataupun peralatan yang memadai. Ini tidak semata-mata akibat berkaitan dengan sikap politik yang lemah, namun juga karena orientasi NIE's yang merupakan negara yang pada taraf membangun sehingga masalah keamanan hanya menjadi salah satu prioritas saja selain ekonomi, pembangunan fisik, sosial dan lain-lainnya.

⁴ Reuel R. Hanks, *Global Security Watch in Asia*, Prager Publishing and ABC Clio, Denver Colorado, 2012, hal119.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya memiliki peranan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di suatu negara. mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan kinerja untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.⁵

Dalam menangani persoalan kartel narkoba menurut S. Puspanathan yang menjabat sebagai pejabat ASEANAPOL bidang kejahatan transnasional menyatakan bahwa :

“...sumber daya manusia ASEAN memang tidak cukup terlatih dalam menangani masalah kejahatan tertentu. Untuk itulah, kerjasama perlu terus ditingkatkan dan munculnya masalah peredaran narkoba yang modus operandinya berbeda-beda memerlukan kebijakan nasional, regional dan supra regional yang selama ini belum berjalan secara efektif.”⁶

Keterbatasan sumber daya manusia di negara-negara ASEAN dalam menangani masalah kartel narkoba meliputi tiga hal, yaitu :

⁵ “What is Human Resources”, dalam <http://www.humanresourcesedu.org/what-is-human-resources/>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

⁶ “Managing Transnational Crime in ASEAN”, dalam <http://asean.org/managing-transnational-crime-in-asean-by-s-pushpanathan/>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

- a. Masalah kejahatan kartel narkoba terus berevolusi sedangkan kemampuan aparat keamanan kemampuannya belum dapat berkembang secara optimal karena faktor anggaran, dukungan politik hingga otorisasi dan isu hak asasi manusia.
- b. Dalam lingkup negara-negara ASEAN belum terbentuk sebuah organisasi yang otonom dan memiliki cakupan tanggung jawab yang luas seperti halnya DEA (*Drugs Enforcement Agency*) Amerika Serikat ataupun ASIO (*Australian Security Intelligent Organization*) yang dimiliki oleh Australia dan beberapa lembaga lainnya.
- c. Jumlah personel pengamanan dan pengawasan yang tidak memadai dan tidak sebanding dengan wilayah yang harus diamankan yang terdiri dari bentang pantai yang luas, hutan yang terjal, ekosistem sungai yang deras dan panjang hingga terminal-terminal transportasi baik darat, udara (bandara) hingga pelabuhan-pelabuhan yang relatif luas dan kompleks untuk diamankan dengan jumlah personel yang terbatas.

Wilayah Asia Tenggara memiliki sumber daya manusia yang beragam. Terdapat kelompok negara dalam jumlah besar, namun terdapat kelompok negara yang memiliki jumlah personel yang relatif kecil. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Jumlah Personel Pertahanan-Kemampuan Negara-negara ASEAN
Periode 2012-2013**

No.	Negara	Jumlah Personel Aktif
1.	Indonesia	395.500
2.	Malaysia	110.000
3.	Singapura	71.600
4.	Thailand	190.000
5.	Brunei Darusalam	92.500
6.	Filipina	220.000
7.	Laos	130.000
8.	Myanmar	30.000
9.	Kamboja	125.000
10.	Vietnam	42.000

Sumber : diolah dari GFP Strength in Number, "Active Military Manpower By Countries", dalam <http://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

Melalui uraian di atas maka dapat diketahui tentang gambaran jumlah personel aktif pada masing-masing negara ASEAN. Jumlah ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan wilayah lain, seperti halnya Asia Selatan ataupun negara-negara Asia Timur dan hal ini juga menjadi kendala dalam menangani kartel narkoba,

2. Keterbatasan Peralatan (*Equipment*)

Peralatan memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan nasional suatu negara, termasuk dalam rangka menangani peredaran narkoba di negara-negara ASEAN. Salah satu teknologi yang belum dimiliki oleh negara-negara ASEAN secara menyeluruh adalah Body Scanner yaitu sebuah alat pemindai yang bisa menembus lapis pakaian seseorang, memetakan bagian tubuh dengan akurat, serta bisa mendeteksi senjata non-logam dan bahan peledak pada permukaan tubuh yang terlindungi oleh pakaian. Cara kerja alat ini sangat cepat dan hanya membutuhkan waktu antara 15 dan 30 detik untuk mendeteksi seseorang. Orang yang hendak diperiksa terlebih dahulu memasuki bilik kecil dan disuruh angkat tangan, kemudian gelombang radio akan mendeteksi tubuh dari segala penjuru. Alat ini segera mengirim gambar 3-D berupa bentuk tubuh tanpa pakaian di layar monitor. Dengan demikian operator bisa mengetahui benda tersembunyi yang melekat pada tubuh “telanjang” tersebut.⁷

Kemudian peralatan lainnya adalah kapal cepat yang jumlahnya belum memadai. Melalui alat transportasi ini aparat keamanan dapat menjalankan kinerja secara efektif karena biasanya juga dilengkapi dengan alat komunikasi termasuk juga GPS dan pendeteksi kedalaman air tergantung faktor kebutuhan dan besar keciklanya sebuah kapal, beberapa kapal juga didesain memiliki 2 kokpit yang bisa dimanfaatkan lebih dari satu operator. Karena kecepatan yang dihasilkan dan dengan dorongan mesin yang berada dibelakang kapal kadang disebut sebagai kapal power, dan dengan

⁷ “Full Body Scanner, Setuju Atau Tidak”, dalam http://www.kompasiana.com/pitsi/fully-body-scanner-setuju-atau-tidak_550983488133114e70b1e1f0, diakses pada tanggal 30 November 2016.

berbagai fitur canggih bisa mengurangi hambatan yang dihasilkan oleh gelombang air dan bisa mencapai kecepatan maksimal.

C. Adanya Benturan Kepentingan Nasional Diantara Negara-negara ASEAN

Kepentingan nasional merupakan bagian penting dari upaya sebuah negara mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh penguasa ataupun dapat juga merupakan transformasi dari para tokoh pendiri (*founding father*). Khusus berkaitan pada bidang keamanan, negara-negara yang terlibat suatu konsensus ternyata akan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Ini tentunya berbeda dengan kerjasama bilateral, organisasi internasional ataupun tripartit dimana negara-negara yang menjelankan kerjasama telah memiliki agenda yang sama.

Kerjasama kewilayahan pada bidang keamanan ternyata menimbulkan rawan benturan kepentingan karena beberapa alasan, *pertama*, setiap negara memiliki prioritas bidang keamanan yang berbeda-beda, *kedua*, hubungan antar negara ternyata tidak selalu berjalan secara harmonis dan *ketiga*, konstelasi keamanan regional sangat mudah berubah sehingga akan sulit untuk diakomodasi oleh kebijakan organisasi regional karena berarti masalah yang dihadapi oleh setiap negara tentunya akan berbeda-beda.⁸

Kemudian berkaitan dengan benturan kepentingan nasional diantara negara-negara ASEAN sebagai faktot penghambat penanganan peredaran narkoba regional ternyata juga ditunjukkan dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang tidak

⁸ Keith R. Krause, *Culture and Security : Multilateralism, Arms Control and Security building*, Frankas Publishing, Portland and London, 2012, hal.66.

membahas tentang persoalan peredaran narkoba secara khusus. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke XIV di Bangkok, Thailand Tahun 2008 yang membahas tentang beberapa agenda penting yang akan dibahas oleh Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN, seperti implementasi ASEAN *Charter*, masalah-masalah internasional dan regional termasuk masalah pangan, energi dan manajemen krisis. Di bidang ekonomi, para Menteri akan membahas berbagai perkembangan seperti kerjasama internal ASEAN dan kerjasama ASEAN dengan Mitra Dialog. Dalam kesempatan ini akan dilakukan juga penandatanganan beberapa dokumen bidang ekonomi dalam rangka memenuhi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community Blueprint*), maupun ASEAN Australia New Zealand FTA.⁹

- b. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke XV Tahun 2009 di Chaam Hua Hin, Thailand Tahun 2008 yang membahas tentang beberapa agenda penting beberapa dokumen yang akan dihasilkan. Pertama adalah Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peresmian Komisi HAM antar pemerintah ASEAN, dan kedua, lanjut dia, Deklarasi Cga-am Hua Hin tentang Penguatan Kerja Sama Pendidikan untuk mencapai Komunitas ASEAN. Kedua deklarasi itu akan disepakati oleh 10 kepala negara dan pemerintahan negara-negara ASEAN

⁹ “KTT ASEAN ke-14 : Komitmen Bersama Menjawab Tantangan ekonomi dunia”, dalam <http://beritasore.com/2009/02/26/ktt-asean-ke-14-%E2%80%9Ckomitmen-bersama-menjawab-situasi-ekonomi-dunia%E2%80%9D/>, diakses pada tanggal 19 September 2016.

yaitu Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei, Laos, Myanmar, Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu awal pekan ini Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Djauhari Oratmangun mengatakan bahwa selain dua deklarasi tersebut, para kepala negara dan pemerintah ASEAN juga dijadwalkan menyepakati Pernyataan tingkat Pemimpin ASEAN mengenai Keterhubungan ASEAN. ASEAN harus saling terhubung untuk menggairahkan perekonomian atau perdagangan intra ASEAN.¹⁰

- c. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke XVI di Hanoi Vietnam Tahun 2010 yang membahas tentang beberapa agenda penting Ada sepuluh isu penting yang menjadi perhatian para Pemimpin negara-negara ASEAN yang dibahas didalam KTT ASEAN ke-16 di Hanoi, Vietnam, yaitu kemajuan pelaksanaan persiapan menuju ASEAN Community 2015 ; ASEAN Connectivity ; Penghormatan HAM ; Kejahatan Lintas Batas Nasional ; KTT G-20 ; Pemilu Myanmar ; Arsitektur baru Kawasan ; Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang berkelanjutan; serta Perubahan Iklim. Isu kedua adalah mengenai Regional Connectivity, dimana Indonesia memandang bahwa koneksitas sangat penting untuk memastikan kerja sama ekonomi dapat berjalan dengan baik. Karena Indonesia merupakan bagian dari pembangunan Regional Connectivity ini, maka pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa pembangunan koneksitas secara domestik berjalan dengan baik agar tidak

¹⁰ “ASEAN +3 Cooperations”, dalam <http://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/22206.pdf>, diakses pada tanggal 19 September 2016.

menimbulkan jurang yang dalam jika dihubungkan dengan kerja sama regional. Oleh karena itu, Indonesia akan membangun infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, transportasi, IT dan lain-lainnya agar pembangunan ekonomi terus tumbuh dan lebih efisien.¹¹

- d. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke XVII di Bali Indonesia Tahun 2011 yang membahas tentang beberapa agenda penting. Gelaran KTT di Nusa Dua menghasilkan Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations. Semangat dari deklarasi yang kemudian disebut sebagai Bali Concord III tersebut adalah memastikan partisipasi dan kontribusi aktif ASEAN mengatasi berbagai permasalahan fundamental global dewasa ini. Penandatanganan dokumen Bali Concord III dilakukan oleh para pemimpin ASEAN di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. Sepuluh orang pemimpin ASEAN secara serempak menandatangani masing-masing dokumen deklarasi yang memetakan jalan ke depan bagi interaksi komunitas ASEAN dengan komunitas global.¹²

Dari paparan KTT di atas ternyata masalah human security hampir tidak pernah dibahas oleh para pemimpin ASEAN. Itulah sebabnya peredaran narkoba ASEAN kurang mendapat dukungan secara politik sebagai spirit atau motivasi bagi para

¹¹ “KTT ASEAN Membahas 10 Isu Penting”, dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/90-mei-2010/817-ktt-asean-membahas-sepuluh-isu-penting.html>, diakses pada tanggal 23 September 2016.

¹² “KTT ASEAN Hasilkan Bali Concord III”, dalam <http://news.detik.com/berita/1769604/ktt-asean-2011-hasilkan-bali-concord-iii>, diakses pada tanggal 23 September 2016.

penegak hukum dan rezim penaggulangan peredaran narkoba regional di ASEAN. Beberapa forum yang belum dapat berjalan secara efektif sepenuhnya diantaranya adalah ASOD dan ASITF.

1. ASEAN *Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) Yang Belum Berjalan Efektif

Kemudian berkaitan dengan benturan kepentingan nasional diantara negara-negara ASEAN sebagai faktot penghambat penanganan peredaran narkoba regional ternyata terdapat beberapa kesepakatan yang belum berjalan secara efektif. Diantaranya adalah agenda *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) kembali digelar tahun ini. Acara tahunan yang melibatkan seluruh negara-negara di ASEAN ini diselenggarakan di Singapura, pada hari Senin hingga Rabu tanggal 24 – 26 Agustus 2015. Selain dihadiri oleh seluruh pimpinan ASOD, pertemuan ASOD yang ke-36 ini juga dihadiri oleh Sekretaris ASEAN dan mitra ASOD lainnya dari luar kawasan ASEAN.¹³

Mr. Masagos Zulkifli selaku Minister, Prime Minister's Office Singapura dalam pembukaan acara tersebut menyatakan bahwa perang melawan Narkoba harus terus dilakukan, utamanya difokuskan pada bahan prekursor dan zat-zat yang tidak terdeteksi (*new psychoactive substances*) yang hingga saat ini masih beredar secara gelap. Masagos juga mengajak seluruh negara ASEAN untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

¹³ “Negara ASEAN Perkuat Kerjasama Dalam Pemberantasan Narkoba”, dalam <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2015/08/25/2034/negara-anggota-asean-perkuat-kerjasama-dalam-melawan-narkoba>, diakses pada tanggal 19 September 2016.

Sejalan dengan pandangan Perdana Menteri Singapura, Kepala BNN Anang Iskandar dalam sambutannya juga menegaskan bahwa sangat perlu adanya penguatan komitmen kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Secara lengkap Anang mengemukakan bahwa :

“...Menghadapi tantangan yang semakin berat dalam melawan Narkoba di tahun 2015 yang mengancam kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat ASEAN ini, maka kita perlu untuk memperkuat kembali komitmen kerjasama serta terus menerus melakukan upaya yang tidak kenal lelah dalam melawan Narkoba melalui pendekatan yang lebih luas dan berimbang antara demand dan suplay,”¹⁴

Belajar dari pengalaman masa lalu maka tidaklah cukup hanya mengandalkan pemberantasan saja, melainkan harus menyeimbangkan antara pemberantasan dan pencegahan atau dengan kata lain menyeimbangkan *demand* dan *supply*. Hal tersebut merupakan kebijakan global dalam menghentikan laju peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba. Upaya pencegahan dan rehabilitasi perlu dilakukan secara gencar di samping upaya pemberantasan yang dilakukan, dan dimana fokus pencegahan yang utama ditujukan kepada para remaja guna menghindari hilangnya generasi bangsa di masa depan.

¹⁴ *Ibid.*

2. Kebijakan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force* (ASITF) Yang Belum Berjalan Efektif

Berkaitan dengan benturan kepentingan nasional diantara negara-negara ASEAN sebagai faktot penghambat penanganan peredaran narkoba regional ternyata ini juga kurang dapat mengikat negara-negara ASEAN karena dalam forum ASITF Indonesia hanya berperan sebagai promotor dan belum dapat menjadi consensus yang mengikat. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi Bersama Dengan Menlu-Menlu Negara ASEAN Serta Menlu Chile, Mesir Dan Maroko merhasil meratifikasi Penandatanganan Perjanjian Untuk Persahabatan Dan Kerjasama (TAC) ASEAN Di National Convention Center, Vientiane, Laos.TAC ASEAN Tersebut Menjadi Langkah Pertama Cile, Mesir Dan Maroko Untuk Menjadi Mitra Dialog ASEAN. Vientiane (Berita) : Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan hasil “ASEAN Seaport Interdiction Task Force” (ASITF) akan menjadi acuan dalam pemberantasan perdagangan narkoba di wilayah ASEAN.¹⁵

Negara-negara ASEAN juga menyampaikan Indonesia telah menjadi tuan rumah The First Asean Seaport Interdiction Task Force atau (ASITF), dan hasil dari ASITF ini akan menjadi ‘focal point’ (acuan) untuk memberantas ‘illicit drug trafficking’ (perdagangan obat-obatan terlarang),Hasil ASITF disampaikan oleh wakil Indonesia, yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

¹⁵ “ASITF Acuan Pemberantasan Perdagangan Narkoba ASEAN”, dalam <http://beritasore.com/2016/09/06/asitf-acuan-pemberantasan-perdagangan-narkoba-asean/>, diakses pada tanggal 24 September 2016.

dan Menlu Retno dalam Pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) Ke-14.¹⁶

ASITF pertama diselenggarakan oleh Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, pada 20-21 Juli 2014, salah satu capaian konkret dari pertemuan itu adalah disepakatinya pembentukan gugus tugas deteksi dini di pelabuhan-pelabuhan kawasan ASEAN untuk mencegah peredaran narkoba. Pada kenyataannya pengawasan wilayah perbatasan dan jalur laut belum dapat berjalan secara efektif karena ini berkaitan dengan faktor teknis yaitu pola atau modus operandi yang berubah-ubah, termasuk adanya penyelundupan melalui peti kemas (container) yang menyebabkan peredaran narkoba lebih sulit untuk dideteksi.

Indonesia sekali lagi juga menyampaikan situasi yang ‘very alarming emergency’ (gawat darurat) terkait narkoba dan menyambut baik adanya badan khusus di APSC yang akan mencapai ‘drug free’ ASEAN (ASEAN bebas narkoba). Selain masalah pemberantasan perdagangan narkoba, Menlu menambahkan bahwa Indonesia juga menekankan pentingnya ASEAN untuk bekerja sama dalam memberantas perdagangan manusia (terutama perempuan dan anak-anak), terorisme dan radikalisme, penangkapan ikan ilegal, keamanan perairan Laut Sulu dan sekitarnya, kejahatan dunia maya, dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). “Sekali lagi jika kita bicara penghormatan HAM, maka Indonesia selalu menyampaikan isu ‘migrant workers’.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat difahami bahwa hambatan yang dihadapi dalam oleh para pemangku kepentingan ASEAN dalam menangani kartel narkoba merupakan bagian dari keterbatasan rezim internasional. Keberadaan rezim berkaitan erat dengan faktor sikap politik (*political will*). Kemudian faktor ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia, diantaranya jumlah skill/kemampuan dan jumlah yang memadai, serta peralatan yang mutakhir untuk mendukung kinerja aparat dalam menangani peredaran kartel narkoba yang selaku berpindah-pindah dan berkembang secara dinamis.

Kemudian hambatan selanjutnya berasal dari adanya benturan dari kepentingan nasional. Keamanan memang menjadi prioritas bagi kelompok negara maju ataupun berkembang, namun prioritas yang dihadapi oleh setiap negara ternyata berbeda-beda, meskipun kelompok negara terletak di suatu kawasan yang sama. Berkaitan dengan hambatan ASEAN dalam menangani kartel narkoba ternyata benturan kepentingan nasional dalam hal ini adalah perbedaan potensi ancaman di antara negara-negara ASEAN, dimana tidak setiap negara menghadapi masalah narkoba karena memang narkoba memiliki motif ekonomi yang kuat dan faktor permintaan (*demand*). Dengan demikian maka dapat diketahui tentang faktor penghambat penanganan kartel narkoba, yaitu sumber daya manusia, peralatan dan benturan kepentingan nasional pada negara-negara ASEAN.